



POTENSI DAN TANTANGAN KERJASAMA ENERGI INDONESIA - RUSIA PASCA BERGABUNGNYA INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA BRICS

Arif Wicaksa^{1*}, Ahmad², Yusnarida Eka Nizmi³, Umunnisa
Hidayati⁴, Rahmi Yulia⁵, Purwasandi⁶
Universitas Riau^{1,2,3,4,5,6}

Abstrack

This paper discusses the potential and dynamics of energy cooperation between Indonesia and Russia following Indonesia's accession as a full member of BRICS in early 2025. In the context of geopolitical tensions, sanctions against Russia, and Indonesia's urgent domestic energy needs, the Indonesia-Russia energy partnership is viewed as a rational and strategic move. The study employs a liberalist approach, the theory of complex interdependence, and the Two-Level Games framework to analyze how Indonesia conducts its economic diplomacy with Russia. This research is based on a qualitative method utilizing literature review and secondary data. The findings reveal that Indonesia has succeeded in increasing oil imports from Russia without violating international sanctions, while still maintaining constructive relations with Western countries. Nevertheless, Indonesia continues to face challenges, particularly in relation to its national energy transition and the consistency of its foreign policy amid ongoing geopolitical dynamics. Therefore, the Indonesia–Russia energy cooperation should be directed not only at meeting short-term demands but also as part of a long-term, sustainable energy and diplomatic strategy.

Keywords: Energy, BRICS, Diplomacy, Interdependence, Indonesia-Russia

Abstrak

Tulisan ini membahas potensi dan dinamika kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia pasca Indonesia menjadi anggota penuh BRICS sejak awal 2025. Dalam konteks geopolitik, sanksi terhadap Rusia, serta kebutuhan energi domestik Indonesia yang sangat tinggi, kerja sama energi Indonesia-Rusia dipandang sebagai langkah strategis yang rasional. Tulisan ini menggunakan pendekatan liberalisme, teori interdependensi kompleks, dan konsep Two-Level Games untuk menganalisis

bagaimana Indonesia menjalankan diplomasi ekonominya terhadap Rusia. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian literatur dan data sekunder. Temuan dari tulisan ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan impor minyak dari Rusia tanpa melanggar batas-batas sanksi internasional, sambil tetap menjaga hubungan dengan negara-negara Barat. Namun demikian, tantangan bagi Indonesia tetap ada, terutama terkait transisi energi nasional serta konsistensi arah kebijakan luar negeri terkait dinamika geopolitik. Oleh karena itu, kerja sama Indonesia-Rusia perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi energi dan diplomasi jangka panjang yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Energi, BRICS, Diplomasi, Interdependensi, Indonesia-Rusia

Pendahuluan

Kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia telah menjadi topik penting dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena kedua negara menghadapi perubahan dalam pasar energi baik karena dinamika politik dunia maupun karena tuntutan domestiknya. Sebagai negara dengan ekonomi yang sedang bertumbuh dan memiliki jumlah populasi masyarakat yang besar, Indonesia membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau untuk mendukung pembangunannya (Loy dkk, 2024). Minyak adalah salah satu pasokan energi yang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan negara. Indonesia sendiri telah memproduksi minyak sebanyak pada awal tahun 2025 sebanyak 600 ribu barel per hari, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional sebanyak 1,5 juta barel per harinya (Indonesia Business Post, 2025). Pada sisi lain, Rusia, yang merupakan salah satu eksportir energi terbesar di dunia, saat ini sedang mencari mitra baru setelah dikenakan sanksi dari negara-negara Barat akibat invasi yang dilakukannya ke Ukraina. Rusia sendiri memproduksi sebanyak 10,35 juta barel per harinya (Reuters, 2025), sedangkan kebutuhan nasional hanya sebanyak 3,6 juta barel per harinya (CEIC, 2023) dan belum ada yang melaporkan kenaikan. Situasi ini menciptakan peluang baik bagi Indonesia maupun Rusia

untuk memperkuat kemitraan energi antara kedua negara, meskipun terdapat tantangan yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak, gas, batubara, serta potensi energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga surya. Namun, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan, sementara pada sisi lain permintaan energi dalam negeri terus mengalami peningkatan meningkat setiap tahunnya (Dewanto, 2023). Berdasarkan hal itu, Indonesia harus mencari alternatif cara untuk memastikan pasokan energi, baik dengan meningkatkan produksi sendiri dalam aspek domestik maupun melalui kerja sama dengan negara lain sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya (Chaerani, 2020). Rusia, di lain pihak, memiliki teknologi maju dan pengalaman di sektor energi, terutama dalam eksplorasi minyak dan gas, energi nuklir, serta pembangkit listrik tenaga air. Contohnya Rosatom, perusahaan milik negara Rusia yang membangun reaktor dari negara Uzbekistan, Iran, hingga Bangladesh dan India serta memfasilitasi 217.4 TWh listrik di Rusia (Financial Times, 2024; Rosatom Newsletter, 2025). Rusia juga, pada sisi lain, tertarik untuk memperluas pasarnya di Asia setelah kehilangan sebagian bisnis di Eropa akibat masalah politik (Luna dan Kunnamas, 2024). Oleh karena itu, peluang kerja sama antara Indonesia dan Rusia berkemungkinan untuk mencapai kepentingan kedua belah pihak.

Kerjasama energi antara Indonesia dan Rusia pada dasarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah hubungan ke dua negara. Pada masa lalu, telah ada beberapa upaya kerja sama di sektor energi. Misalnya, Pertamina (perusahaan minyak milik Indonesia) dan Rosneft (perusahaan minyak Rusia) telah menjalin kerja sama sejak tahun 2017 dan setuju untuk membangun kilang di Tuban, Jawa Timur. Proyek kerjasama tersebut mengalami hambatan yang menunjukkan bahwa kerja

sama antara kedua negara tidak selalu berjalan mulus (Nisa dan Sihidi, 2022). Ada beberapa alasan untuk ini, seperti perbedaan budaya bisnis, regulasi yang rumit di Indonesia, serta sanksi internasional yang menyulitkan perusahaan Rusia berbisnis di luar negeri. Pada sisi lain, sejarah kerjasama antara Pertamina dan Rosneft menjadi semacam bukti empiris bahwa kerjasama energi antara Indonesia dan Rusia bukanlah hal yang baru.

Tahun 2025 menjadi tahun bersejarah bagi Indonesia karena Indonesia secara resmi telah bergabung sebagai anggota dari BRICS yang merupakan blok ekonomi dan politik yang diharapkan mampu menjadi alternatif bagi kebutuhan ekonomi dan pasar bagi Indonesia. Dengan bergabungnya Indonesia kepada BRICS semakin menguatkan potensi peningkatan kerjasama dengan Rusia yang merupakan negara anggota inti dari BRICS (Maulana dkk, 2024).

Pasca bergabungnya Indonesia dalam blok BRICS pada Januari 2025, terbuka peluang baru dalam konfigurasi kerja sama strategis Indonesia-Rusia, khususnya di sektor energi. Selama ini, kajian hubungan energi Indonesia–Rusia cenderung terbatas pada kerja sama bilateral konvensional dan belum banyak membahas dinamika yang muncul akibat pergeseran geopolitik kawasan dan keanggotaan Indonesia dalam aliansi ekonomi-politik baru seperti BRICS. Artikel ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis kerja sama energi Indonesia–Rusia dalam konteks pasca-keanggotaan Indonesia di BRICS—sebuah sudut pandang yang belum banyak diangkat dalam literatur sebelumnya. Melalui pendekatan ini, artikel mengevaluasi bagaimana Indonesia dapat mengedepankan kepentingan energinya sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan strategis dalam hubungan bilateral tersebut. Dengan menelaah dinamika kontemporer dan memetakan arah kerja sama potensial, tulisan ini tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri energi.

Kebaruan substansi ini berdampak pada terbatasnya literatur ilmiah yang tersedia untuk memahami potensi dan tantangan kerjasama Indonesia-Rusia pada sektor energi fosil khususnya. Misalnya jurnal tulisan Ibrahim dkk (2024) masih memfokuskan pada pembahasan seputar implikasi perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan sanksi kepada Rusia. Sedangkan pada aspek Indonesia, melihat pada arah tuntutan untuk akselerasi percepatan transisi energi terbarukan. Namun pembahasan aspek tuntutan domestik atas kebutuhan energi tidak terbarukan belum begitu terelaborasi dengan mendalam. Sedangkan pada tulisan lain, misalnya jurnal karya Dano (2022) memfokuskan pada kenaikan harga minyak domestik Indonesia akibat sanksi Barat terhadap Rusia dan argumen Dano juga disepakati oleh Nabila dkk (2023) dalam tulisan artikel jurnalnya. Kenaikan yang terjadi merupakan efek *supply shock* yang terjadi setelah sanksi tersebut dijatuhkan kepada Rusia. Pembahasan tentang peluang Rusia sebagai mitra perdagangan minyak dan gas untuk kestabilan pasokan minyak domestik bukan menjadi fokus dari tulisan Dano. Pembahasan tentang peluang kerjasama disinggung pada tulisan Arlan (2020) yang mengindikasikan peluang yang bisa didapatkan Indonesia seiring dengan perhatian Rusia yang meningkat ke Asia Tenggara, sehingga Indonesia bisa melihat Rusia sebagai peluang diversifikasi pasar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi Indonesia. Namun pembahasan mendalam terkait sektor energi, serta faktor BRICS bukan menjadi sorotan dari tulisan Arlan tersebut.

Bisa disimpulkan, bahwa tulisan ini penting dalam mempertimbangkan kebijakan luar negeri Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sehingga faktor keanggotaan Indonesia pada BRICS ini patut untuk ditelusuri lebih jauh akan dampak positif yang diharapkan. Pada sisi lain, meskipun Indonesia telah memulai proses transisi energi ke arah energi terbarukan, namun ketergantungan terhadap sektor energi tak

terbarukan di wilayah domestik masih tinggi, sehingga Indonesia perlu melakukan manuver strategis untuk mengatasi tuntutan domestik ini. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini berusaha masuk pada celah tersebut untuk menganalisis langkah strategis yang dilakukan Indonesia untuk mengedepankan kepentingannya dalam kerjasama energi dengan Rusia pasca BRICS dan kemungkinan tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Kesimpulannya, kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia memiliki potensi besar tetapi juga banyak tantangan. Penelitian ini akan menggunakan data dan literatur yang tersedia untuk menganalisis situasi dan memberikan wawasan yang diharapkan dapat bermanfaat secara akademik dan praktis bagi para pengambil kebijakan.

Kerangka Analisis

Tulisan ini menggunakan pendekatan Liberalisme dalam hubungan internasional sebagai kerangka berpikir utama untuk menjelaskan dinamika kerja sama antarnegara. Dalam pendekatan liberalisme, negara diposisikan sebagai aktor rasional yang tidak hanya berorientasi pada kekuatan dan keamanan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan domestik melalui kerja sama antar negara. Sebagaimana manusia yang dipandang sebagai makhluk rasional, negara juga bertindak berdasarkan perhitungan rasional untuk memperoleh keuntungan dan mengatasi keterbatasan internal. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara menjadi sesuatu yang wajar dan bahkan diperlukan, karena kepentingan domestik mendorong negara untuk mencari solusi di luar batas wilayahnya sendiri.

Pendekatan liberalisme ini menjadi relevan ketika melihat konteks kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia. Kedua negara memiliki kebutuhan domestik yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi secara mandiri. Dalam hal ini, kerja sama menjadi langkah yang rasional bagi negara untuk mengatasi keterbatasan dan meraih kepentingan nasional

masing-masing. Kerja sama tersebut bukan semata hanya pilihan politik, tetapi juga representasi dari logika liberal bahwa interaksi antarnegara dapat saling menguntungkan jika dibangun di atas dasar kepentingan bersama (Burchill dkk, 2005)

Lebih lanjut, tulisan ini juga mengacu pada Teori Interdependensi Kompleks yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye. Teori ini menekankan bahwa dalam sistem internasional modern, negara-negara punya kecenderungan untuk saling bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek seperti ekonomi, keamanan, sosial, hingga politik. Ketergantungan ini pada akhirnya mendorong negara untuk menghindari konflik terbuka karena biaya yang harus ditanggung sering kali jauh lebih besar dibandingkan keuntungan strategis jangka pendek yang mungkin diperoleh. Di sinilah logika *zero-sum game* yang khas dalam pendekatan realis mulai tergeser oleh logika *positive-sum game* dalam pendekatan liberalis, di mana kerja sama memberikan manfaat timbal balik bagi semua pihak yang terlibat (Keohane dan Nye, 2012)

Dalam konteks kerja sama Indonesia dan Rusia, teori ini membantu menjelaskan mengapa Indonesia memilih untuk bersikap kooperatif ketimbang konfrontatif terhadap Rusia, terutama terkait isu perang Rusia-Ukraina. Indonesia mengambil sikap berbeda dari negara-negara Barat yang menjatuhkan sanksi dan membatasi hubungan dengan Rusia, Indonesia tetap membuka ruang kerja sama, khususnya dalam sektor energi. Hal ini dapat dilihat sebagai bagian dari rasionalitas interdependensi yakni ketika kerja sama dinilai lebih menguntungkan dan berkontribusi terhadap stabilitas domestik, maka negara cenderung akan memilih jalur kolaboratif.

Untuk memperkuat analisis dan memberikan dimensi tambahan, penulis juga menggunakan konsep *Two-Level Games*

yang diperkenalkan oleh Robert D. Putnam. Konsep ini melihat bahwa dalam setiap negosiasi internasional, terdapat dua arena yang harus diperhatikan oleh para pemimpin negara. Pertama, arena internasional, di mana pemimpin negara bernegosiasi dengan pihak eksternal untuk mencapai kesepakatan. Kedua, arena domestik, di mana hasil kesepakatan tersebut harus kemudian “dijual” kepada publik, parlemen, kelompok kepentingan, hingga militer agar dapat diimplementasikan secara efektif (Putnam, 1988).

Melalui pendekatan ini, penulis akan menggambarkan bagaimana Indonesia menjalankan diplomasi energi dengan Rusia, mulai dari proses perundingan bilateral hingga upaya membangun konsensus domestik. Dalam konteks politik luar negeri Indonesia, negosiasi semacam ini tidak hanya soal perhitungan antarnegara, tetapi juga tentang bagaimana menjembatani berbagai kepentingan internal agar kebijakan luar negeri yang diambil tetap mendapat dukungan dan legitimasi di dalam negeri.

Dengan kerangka berpikir ini, penulis berupaya untuk menjelaskan bahwa kerja sama energi Indonesia dan Rusia tidak hanya sekadar respons terhadap dinamika global, tetapi juga merupakan cerminan dari kemampuan negara dalam menjalankan peran di dua level arena secara berkesinambungan yakni menjalin hubungan strategis di tingkat internasional dan memastikan dukungan politik di tingkat domestik.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama dari penelitian ini bukan pada pengukuran statistik terhadap data-data numerik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap dinamika politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam konteks kerja sama energi dengan Rusia. Sifat data yang digunakan pun bersifat non-numerik,

terdiri atas literatur akademik, pernyataan tokoh politik, dokumen kebijakan, artikel berita, serta sumber lain yang relevan dengan fokus pembahasan penelitian, pertanyaan penelitian, dan kerangka analisis yang digunakan (Cresswell, 2014)

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berbasis digital, yaitu dengan mengakses sumber-sumber yang tersedia secara daring baik dalam bentuk artikel jurnal ilmiah, artikel berita, maupun transkrip pernyataan resmi. Penelusuran dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada fokus analisis dan teori yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini.

Pendekatan liberalisme yang digunakan dalam tulisan ini mengarahkan pencarian data pada bentuk-bentuk kerja sama antara Indonesia dan Rusia, terutama dalam sektor energi, serta dinamika hubungan bilateral yang menunjukkan kecenderungan rasional dan saling menguntungkan di antara kedua negara. Dalam pendekatan ini, kerja sama dilihat sebagai instrumen negara untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan domestik, sehingga pencarian data juga diarahkan pada konteks kebijakan energi dan diplomasi ekonomi Indonesia.

Sementara itu, penggunaan Teori Interdependensi Kompleks dari Keohane dan Nye memandu penulis untuk mengeksplorasi data yang menggambarkan tingkat ketergantungan antara Indonesia dan Rusia serta konsekuensi rasional dari pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang dihadapi oleh Indonesia. Dalam hal ini, penulis menggali literatur yang membandingkan risiko dan manfaat dari sikap kooperatif dibandingkan sikap konfrontatif terhadap Rusia, terutama dalam kaitannya dengan posisi Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina.

Selain itu, konsep *Two-Level Games* dari Robert D. Putnam dijadikan alat bantu analisis untuk memahami dinamika diplomasi Indonesia dalam dua arena, internasional dan

domestik. Konsep ini membuka ruang untuk melihat bagaimana kebijakan luar negeri tidak hanya dibentuk di meja perundingan antarnegara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika domestik. Karena itu, pengumpulan data juga diarahkan pada dua tingkatan: Pertama, strategi diplomasi Indonesia di tingkat internasional dalam membangun kesepakatan dengan Rusia. Kedua, bagaimana pemerintah Indonesia memproses, mengkomunikasikan, dan membangun legitimasi atas kesepakatan tersebut di dalam negeri.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan ketiga kerangka tersebut. Proses klasifikasi ini bertujuan agar analisis dapat dilakukan secara fokus, sistematis, dan sesuai dengan logika teoritik yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan metode pembacaan mendalam dan interpretasi kritis terhadap isi dari tiap sumber. Penulis menelaah relevansi dan substansi dari setiap informasi berdasarkan kecocokannya dengan masalah yang diteliti. Proses ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, yaitu dengan membandingkan, mengaitkan, dan mengevaluasi berbagai argumen yang ditemukan dalam data. Temuan-temuan yang dihasilkan dari proses ini kemudian disusun menjadi simpulan-simpulan yang memperkuat atau justru melemahkan kerangka berpikir awal penulis. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memetakan potensi, tantangan, serta prediksi rasional dari kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia, khususnya dilihat dari sudut pandang kepentingan nasional Indonesia serta dinamika politik luar negeri dalam konteks global yang semakin kompleks dan kompetitif.

Pembahasan

Kerjasama Energi Indonesia-Rusia dalam Perspektif Liberalisme

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia bukanlah sesuatu yang baru. Kedua negara telah menjalin interaksi diplomatik sejak masa Perang Dingin, dengan latar belakang historis yang lama dan dipengaruhi oleh posisi Indonesia sebagai bagian dari Gerakan Non-Blok. Hal ini menjadikan Indonesia cukup leluasa dalam membangun hubungan dengan berbagai negara selama sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, termasuk Rusia. Prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” menjadi landasan filosofis utama dalam pendekatan kerja sama ini, yakni bebas untuk menentukan arah kebijakan secara independen, dan aktif dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak (Sadewa dan Hakiki, 2023).

Keputusan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada awal tahun 2025 memberikan dinamika baru bagi dinamika hubungan Indonesia-Rusia, khususnya dalam sektor energi. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS bukan sekedar simbol pengakuan atas posisi strategisnya di kawasan, tetapi juga menjadi peluang konkret untuk usaha diversifikasi pasar dan memperoleh akses terhadap transfer teknologi dari negara-negara mitra, termasuk Rusia (Kemlu, 2025). Namun, langkah ini tentu tidak tanpa konsekuensi. Di satu sisi, Indonesia mendapatkan peluang integrasi ekonomi baru dengan negara-negara BRICS namun pada sisi lain, Indonesia harus berhati-hati terhadap sensitivitas politik negara-negara Barat yang memiliki hubungan tidak harmonis dengan Rusia, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina.

Dalam situasi tersebut, kebijakan luar negeri “bebas aktif” kembali diuji. Indonesia tidak mengambil sikap konfrontatif terhadap Rusia seperti yang dilakukan oleh banyak negara Barat. Sebaliknya, Indonesia memilih pendekatan yang lebih strategis dan pragmatis, menjaga hubungan baik dengan semua pihak sambil tetap memprioritaskan kepentingan

nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan energi domestik.

Setelah resmi menjadi anggota BRICS, intensitas pembicaraan antara Indonesia dan Rusia terkait kerja sama energi, terutama energi baru terbarukan, mengalami peningkatan. Salah satu langkah konkret terjadi pada April 2025, ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan pembicaraan dengan pihak Rusia mengenai potensi pengembangan energi terbarukan (Kemenko Perekonomian, 2025). Tidak lama setelah itu, pada Mei 2025, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Federasi Rusia, Andrey Yatskin, untuk memperkuat agenda kerja sama, terutama dalam pengembangan energi nuklir melalui pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Rusia dipandang sebagai mitra strategis karena memiliki pengalaman dan keunggulan teknologi di sektor ini. Indonesia memposisikan kerja sama ini sebagai bagian dari komitmennya terhadap agenda transisi energi global sekaligus solusi terhadap kebutuhan energi nasional, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau listrik (MPR RI, 2025).

Di tengah krisis global yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, memberikan sanksi terhadap sektor energi Rusia, termasuk minyak dan gas yang merupakan dua sektor andalan ekspor Rusia (Gayatri, Olivia dan Nizmi, 2024). Dalam konteks ini, pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada tahun 2025 yang menyebutkan bahwa Indonesia membuka peluang untuk mengimpor minyak dari Rusia menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia tetap mengedepankan pragmatisme. Persoalan ini juga disetujui oleh Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Energi Nasional, yang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan menutup kemungkinan membeli minyak dari Rusia selama harga yang ditawarkan lebih kompetitif (Tempo, 2025). Meski demikian, Pemerintah Indonesia tetap menyadari adanya

risiko politik dan ekonomi akibat kemungkinan pelanggaran terhadap sanksi internasional. Oleh karena itu, dalam mengelola kebijakan energi luar negeri ini, Indonesia berupaya untuk tetap patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) milik Amerika Serikat, guna menghindari potensi sanksi sekunder yang bisa merugikan secara lebih luas (Tirto, 2025).

Dari sisi kebutuhan domestik, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil seperti minyak dan gas masih sangat tinggi sementara kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut (Tais dkk, 2024). Ini menjadikan isu ketahanan energi sebagai salah satu aspek vital dalam stabilitas nasional, dan menjadi salah satu agenda prioritas kebijakan Presiden Prabowo Subianto (Firdaus dan Wibowo, 2024). Dengan demikian, diversifikasi mitra energi, termasuk melalui kerja sama dengan Rusia, merupakan strategi logis yang selaras dengan kepentingan nasional Indonesia.

Menariknya, meskipun hingga Mei 2025 belum terdapat kesepakatan resmi antara Indonesia dan Rusia terkait pembelian minyak, data menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam impor minyak asal Rusia. Terminal minyak di Karimun, Kepulauan Riau, yang berstatus sebagai zona perdagangan bebas, melaporkan bahwa impor minyak diesel dari Rusia meningkat dari nol menjadi 217.000 ton, atau sekitar 1,6 juta barel. Selain itu, impor minyak bakar dari Rusia mencapai 500.000 metrik ton, setara dengan 3,2 juta barel, artinya terjadi kenaikan lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada pengumuman formal, secara *de facto* telah terjadi peningkatan kerja sama energi fosil antara Indonesia dan Rusia (Financial Review, 2025)

Peningkatan ini terjadi bersamaan dengan status baru Indonesia sebagai anggota BRICS. Maka, dapat diasumsikan bahwa keanggotaan tersebut memberikan ruang strategis baru

dan legitimasi tambahan bagi Indonesia untuk memperluas jalur pasokan energi tanpa harus sepenuhnya tunduk pada tekanan geopolitik negara-negara Barat. Namun, Indonesia tetap berjalan di wilayah terjal dalam politik internasional, Indonesia harus mengupayakan keseimbangan antara kerja sama energi yang menguntungkan dan kehati-hatian diplomatik agar tidak memicu respons negatif dari negara mitra di Barat.

Interdependensi Kompleks dan Pilihan Strategis Indonesia

Pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Kemlu menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi kondisi krisis yang bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Kondisi tersebut dikenal secara global dengan istilah *polycrisis* yakni sebuah istilah yang merujuk pada keterhubungan antar berbagai krisis yang bersifat global yang terjadi secara bersamaan, seperti konflik geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, hingga instabilitas pangan dan energi. Salah satu titik krusial dari *polycrisis* ini adalah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, yang memicu respons luas dari negara-negara Barat berupa sanksi ekonomi terhadap Rusia. Situasi ini kemudian memaksa banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meninjau kembali arah kebijakan luar negerinya (Kemlu, 2025)

Bagi Indonesia, tantangan tersebut hadir dalam dua dimensi yakni dimensi tekanan diplomatik dan dimensi tekanan ekonomi. Pada satu sisi, Indonesia penting untuk menjaga hubungan baik dengan mitra tradisionalnya di Barat. Namun pada sisi lain, tekanan dari mitra Barat, terutama terkait dengan isu lingkungan dan HAM, sering kali berimplikasi negatif terhadap sektor-sektor strategis dalam negeri. Misalnya, Uni Eropa telah menerapkan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang berdampak langsung pada ekspor kelapa sawit Indonesia yang merupakan sektor yang menyerap

tenaga kerja dalam jumlah besar bagi Indonesia. Selain itu, ekspor batu bara Indonesia juga mulai menghadapi hambatan politik dan reputasi karena tekanan terhadap transisi energi global (Martinus, 2025).

Dalam konteks tersebut, keanggotaan Indonesia dalam BRICS menjadi langkah strategis. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS pada awal 2025 sangat berpotensi untuk membuka akses ke pasar non-Barat yang lebih toleran terhadap pendekatan pragmatis dalam kerja sama ekonomi Indonesia. BRICS menyediakan jalur alternatif untuk memperluas ekspor komoditas Indonesia seperti batu bara, sawit, serta kerja sama infrastruktur dan energi, termasuk energi fosil yang masih sangat dibutuhkan Indonesia dalam jangka menengah.

Dari sudut pandang kebutuhan energi fosil bagi Indonesia, lebih dari 60% bauran energi primer Indonesia masih bergantung pada energi fosil, termasuk minyak dan gas bumi (Kementerian ESDM, 2024). Di tengah proses transisi energi yang lambat dan keterbatasan fiskal, kebutuhan impor energi tetap tinggi. Dalam situasi yang dihadapi Indonesia ini, Rusia muncul sebagai mitra yang potensial. Rusia, sebagai eksportir minyak terbesar ketiga di dunia setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat (Gultom dkk, 2024), Rusia memiliki kapasitas dan insentif untuk menjual minyak dengan harga lebih kompetitif, terutama karena sanksi Barat membatasi aksesnya ke pasar tradisional. Bagi Indonesia, peluang ini strategis secara ekonomi dan politik.

Pada sisi lain, kemenangan Donald Trump dalam pemilu presiden Amerika Serikat pada tahun 2024 menciptakan dinamika baru dalam politik global yang berdampak pada hubungan bilateral dengan Indonesia. Selama masa jabatan pertamanya, Trump menerapkan kebijakan proteksionis terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Misalnya, pada tahun 2018 Indonesia kehilangan *Generalized System of Preferences* (GSP), yang menyebabkan tarif masuk bagi berbagai

produk Indonesia di AS meningkat (Pujayanti, 2018). Dalam periode keduanya, arah kebijakan Trump kembali memunculkan kekhawatiran terhadap kestabilan perdagangan global dengan menerapkan tarif secara masif dan luas bagi banyak negara termasuk Indonesia. Lebih lanjut, dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, Trump menunjukkan kecenderungan untuk menarik diri dari komitmen tradisional Amerika Serikat terhadap Ukraina. Dalam berbagai pernyataan publik dan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Trump mengindikasikan bahwa konflik tersebut harus diselesaikan oleh pihak-pihak terkait tanpa banyak mengandalkan bantuan Amerika Serikat. Sikap ini sangat kontras dengan pendekatan Joe Biden yang menjadikan dukungan terhadap Ukraina sebagai salah satu pilar kebijakan luar negerinya (Vyas, 2025).

Dalam konteks melemahnya dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina dapat ditafsirkan oleh negara-negara seperti Indonesia sebagai semacam peluang untuk lebih leluasa dalam membangun hubungan dengan Rusia tanpa merasa khawatir dengan tekanan diplomatik berlebihan dari Barat. Indonesia juga berpotensi untuk meningkatkan hubungan dagang, termasuk menjajaki kerja sama energi yang lebih formal dengan Rusia, seperti pembelian minyak mentah secara langsung.

Dengan peningkatan impor minyak Rusia ke Indonesia secara *de facto* sebesar 217.000 ton ke Karimun, menunjukkan bahwa Indonesia secara bertahap sedang membangun hubungan interdependensi baru dengan Rusia untuk memenuhi kebutuhan nasional, khususnya dalam sektor energi termasuk di dalamnya energi fosil. Begitu juga Rusia yang terhalang oleh embargo tentunya membutuhkan pasar untuk menjual produksi pada sektor energinya. Hubungan ini didorong oleh rasionalitas ekonomi, kebutuhan domestik, serta ruang manuver yang diperoleh dari perubahan dinamika geopolitik global. Di tengah tekanan dari Barat dan transisi

politik di Amerika Serikat, Indonesia memilih untuk mengambil posisi strategis dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan nasional dan dinamika global yang merupakan sebuah strategi khas dari politik luar negeri "bebas dan aktif" yang bersifat pragmatis sesuai kepentingan nasional Indonesia.

Konsolidasi Kepentingan Indonesia Melalui Peran Strategis Kadin

Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Ketua Dewan Energi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait kemungkinan pembelian minyak dari Rusia, mencerminkan manuver awal Indonesia dalam membentuk konsolidasi kepentingan strategis di level internasional. Pernyataan keduanya menjadi pertanda bagi publik terhadap arah baru kebijakan energi Indonesia, yang semakin terbuka untuk menjalin kemitraan dengan Rusia sebagai alternatif sumber energi sekaligus menjadi strategi diversifikasi pasokan di tengah tekanan geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia.

Langkah tersebut kemudian diperkuat secara institusional melalui kesepakatan kerja sama yang ditandatangani pada April 2025 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mewakili pemerintah Indonesia bersama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie. Dari pihak Rusia, kesepakatan ditandatangani oleh Denis Manturov, yang merupakan *First Deputy Prime Minister* Federasi Rusia, serta Kiril Kamenav, *Deputy CEO* dari *Far East and Arctic Development Corporation* (FEDC), sebuah lembaga strategis Rusia yang dibentuk untuk memperkuat ekspansi ekonomi Moskow ke kawasan Asia-Pasifik dan Arktik (Kemenko Perekonomian, 2025).

MoU yang ditandatangani tersebut mencakup kerja sama pada banyak sektor mulai dari energi (minyak dan gas),

pertahanan, riset dan pengembangan (R&D), hingga pendidikan. Yang patut digaris bawahi, dokumen ini secara eksplisit membuka ruang bagi penguatan arus perdagangan minyak dan gas Rusia ke Indonesia, sebuah langkah yang tidak bisa dilepaskan dari status baru Indonesia sebagai anggota BRICS. Sebagaimana kesepakatan dalam pertemuan tersebut, kerja sama dengan Rusia dipandang sejalan dengan kepentingan jangka menengah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, sekaligus menjawab tantangan terhadap kelangkaan dan harga energi global yang masih fluktuatif (Kadin RI, 2025).

Pemerintah Indonesia pun melibatkan masyarakat secara terbuka terkait impor pada sektor energi dari Rusia yaitu melalui Pertamina dengan sistem tender seperti yang dikemukakan oleh Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Taufik Adityawarman, jika ada minyak mentah asal Rusia yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan Indonesia dan telah terdaftar di kilang domestik, maka pemasok dipersilakan untuk mengikuti proses tender. Namun demikian, partisipasi dalam tender tetap harus mengikuti ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan secara resmi (Bloomberg Technoz, 2025).

Hal yang patut mendapat perhatian adalah posisi KADIN Indonesia dalam proses ini. Sebagai organisasi payung dunia usaha Indonesia yang memiliki dasar hukum melalui UU No. 1 Tahun 1987, KADIN memang bukan bagian dari struktur pemerintahan. Namun dalam praktiknya, KADIN berfungsi sebagai *quasi-governmental actor* sebuah entitas hibrida yang berada pada irisan kepentingan antara swasta dan kebijakan publik. KADIN tidak hanya menjadi representasi pelaku usaha, tetapi juga menjalin kedekatan intensif dengan kementerian-kementerian terkait, bahkan memiliki peran dalam mendampingi BUMN dalam berbagai kegiatan internasional.

Dalam konteks MoU antara Indonesia dan Rusia, posisi KADIN menjadi sangat strategis. Keterlibatan langsung organisasi ini dalam negosiasi dan penandatanganan kesepakatan menjadikan kerja sama ini dibangun atas dasar yang cenderung *business-to-business* (B2B), bukan sepenuhnya *government-to-government* (G2G). Strategi ini memiliki keunggulan diplomatik tersendiri. Pada satu sisi, Indonesia tetap dapat membangun relasi ekonomi dengan Rusia secara substantif. Di sisi lain, kerangka B2B memungkinkan Indonesia untuk menghindari perhatian atau tekanan langsung dari negara-negara Barat yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia, khususnya pada sektor energi Rusia.

Selain itu, penggunaan aktor non-pemerintah (meskipun erat dengan pemerintah) seperti KADIN juga menjadi bagian dari pendekatan *plausible deniability* yang umum digunakan dalam praktik diplomasi ekonomi. Dengan melibatkan KADIN dan entitas usaha, pemerintah Indonesia menjaga ruang fleksibilitas untuk menyesuaikan respons jika terjadi eskalasi diplomatik atau tekanan dari pihak ketiga, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Strategi semacam ini sesuai dengan tren global di mana aktor non-negara memainkan peran penting dalam diplomasi lintas batas. Dalam banyak kasus, *chambers of commerce*, asosiasi industri, dan konsorsium bisnis justru menjadi jembatan diplomatik dengan tujuan untuk membuka atau memperluas jalur ekonomi dengan negara yang secara politik sulit didekati secara langsung (Păun dan Păun, 2024). Dalam kasus Indonesia, pendekatan ini mencerminkan diplomasi ekonomi yang bersifat adaptif dan realistis, dengan berorientasi pada tujuan utama untuk pemenuhan kebutuhan domestik.

Perlu dicatat pula bahwa ketertarikan Rusia untuk menanamkan investasi di sektor energi dan pertahanan Indonesia juga didorong oleh faktor internal mereka sendiri. Dengan pasar energi Eropa yang tertutup akibat sanksi, Rusia

gencar mengalihkan ekspornya ke Asia. Asia Tenggara termasuk menjadi wilayah prioritas baru untuk ekspansi pasar energi dan teknologi sipil Rusia, termasuk reaktor nuklir modular kecil (SMR), LNG, dan investasi migas. Berdasarkan hal ini, terlihat bahwa kerja sama antara Indonesia dan Rusia pasca keanggotaan Indonesia di BRICS bukan hanya soal kebutuhan Indonesia semata, melainkan juga bagian dari pergeseran geopolitik energi global. MoU antara KADIN dan FEDC menjadi awal dari dinamika baru hubungan Indonesia-Rusia, yang diproyeksikan tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga strategis dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Pendekatan Indonesia dalam menjalin kerja sama energi dengan Rusia merepresentasikan strategi diplomasi yang hati-hati namun berkembang secara progresif. Dengan tekanan geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina dan sanksi dari negara-negara Barat, Indonesia memilih jalan yang pragmatis yaitu tetap mengakses sumber energi dari Rusia namun tidak atau belum melibatkan kesepakatan formal tingkat tinggi antarnegara. Model kerja sama ini dijalankan dengan menggandeng sektor swasta melalui Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai aktor utama dalam negosiasi dan transaksi, sekaligus sebagai bentuk *buffer* diplomatik untuk menghindari tekanan internasional secara langsung terutama negara-negara Barat yang memberikan sanksi kepada Rusia. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip liberalisme dalam hubungan internasional, yang menekankan pada rasionalitas aktor negara dalam mempertimbangkan untung-rugi dari sebuah kebijakan. Secara *de facto*, Indonesia telah meningkatkan impor minyak dan produk energi dari Rusia, terutama sejak menjadi anggota penuh BRICS pada awal 2025. Meskipun demikian, Indonesia tetap berhati-hati dengan tidak secara eksplisit melanggar sanksi internasional. Dari strategi ini

dapat dipahami bahwa Indonesia berada dalam posisi yang fleksibel yang maksudnya mampu menjaga relasi baik dengan negara-negara BRICS sambil tetap menjalin hubungan konstruktif dengan negara-negara Barat. Selanjutnya, kemenangan Donald Trump pada pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2024 dapat menjadi faktor yang membuka ruang bagi Indonesia untuk memformalkan kerja sama energi dengan Rusia. Trump punya kecenderungan untuk mengambil pendekatan non-konfrontatif terhadap Rusia dan tampaknya berusaha mengurangi dukungan militer ke Ukraina. Bila pola ini terus berlanjut, maka kemungkinan penolakan dari Amerika Serikat terhadap langkah Indonesia bisa jadi menurun. Artinya, peluang Indonesia untuk mengembangkan perjanjian jual beli minyak secara formal dengan Rusia semakin terbuka di masa pemerintahan Trump kedua.

Tetap perlu diingat bahwa ketergantungan pada energi fosil, termasuk dari Rusia, bukanlah solusi jangka panjang. Ketahanan energi nasional tidak bisa dibangun semata-mata dengan mengandalkan pasokan impor, melainkan juga dengan mempercepat transisi ke energi terbarukan. Maka dari itu, kerja sama energi Indonesia-Rusia seharusnya tidak berhenti pada perdagangan minyak dan gas, tetapi seharusnya juga dapat diperluas ke sektor strategis seperti pengembangan energi terbarukan. Dari sisi kebijakan luar negeri, penggunaan aktor seperti Kadin sebagai *quasi-governmental actor* adalah langkah strategis yang memberi ruang gerak fleksibel sekaligus menjaga batas diplomatik. Namun, dalam jangka panjang, mekanisme seperti ini tetap membutuhkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

Anshul Vyas. (2025). Transactional diplomacy and the Russia-Ukraine conflict: A U.S. foreign policy shift during the

- Trump era. SSRN.
<https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5223629>
- Arlan, A. (2024). ASEAN, Indonesia dan Rusia Timur Jauh: Peluang dan diversifikasi. *Verity – UPH Journal of International Relations*, 5(2), 54–65.
<https://doi.org/10.19166/verity.v11i22.2456>
- Bloomberg Technoz. (2025, May 21). Pertamina akui sudah mulai impor minyak Rusia: lewat tender. Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/71864/pertamina-akui-sudah-mulai-impor-minyak-rusia-lewat-tender/2>
- Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Paterson, M., Reus-Smit, C., & True, J. (2005). *Theories of international relations* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- CEIC Data. (2024). Russia Oil Consumption, 1985 – 2023. CEIC. <https://www.ceicdata.com/en/indicator/russia/oil-consumption>
- Chaerani, P. (2020). Dampak eksplorasi migas PetroChina terhadap ketahanan energi Indonesia. *Jurnal Wanua*, 5(2), 165–180.
- Contreras-Luna, R., & Kunnamas, N. (2023). Recalibrating Moscow's strategies in Asia: Russia and Southeast Asia in a multipolar world. *Indian Journal of Science and Technology*, 11(3), 11–28. <https://doi.org/10.5752/P.2317-773X.2023v11n3p11-28>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dano, D. (2022). Analisis dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap harga bahan bakar minyak di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3), 261–268. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1494>

- Dewanto, M. E. (2023). Proyeksi produksi migas Indonesia sampai dengan tahun 2045. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(2), 195–210. <https://doi.org/10.22219/jie.v7i02.24654>
- Dzikiara Pesona Sadewa, & Falhan Hakiki. (2024). Dinamika kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia melalui Gerakan Non-Blok (GNB). *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 1–28. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.422>
- Financial Review. (2024, April 12). Impor minyak Rusia ke Indonesia terus meningkat. <https://www.financialreview.id/industri/63415194719/impor-minyak-rusia-ke-indonesia-terus-meningkat>
- Firdaus, R. S. M., & Wibowo, I. A. (2024). Tinjauan kritis atas visi dan misi Prabowo-Gibran tentang kerangka regulasi transisi energi hijau. *Jurnal Pro Natura*, 1(1), 19–39.
- Gultom, A. D. (2024). Pengaruh perang Rusia-Ukraina terhadap perdagangan internasional. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(6), 39–47.
- Ibrahim, M. R., Sudirman, A., & Tumulo, L. J. (2024). Implikasi dinamika geopolitik energi Rusia-Ukraina terhadap keamanan energi di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1314–1323. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Indonesia Business Post. (2025). SKK Migas prepares strategies to boost oil and gas lifting. *Indonesia Business Post*. <https://indonesiabusinesspost.com/3925/energy-and-resources/skk-migas-prepares-strategies-to-boost-oil-and-gas-lifting>
- Kadin Indonesia. (2024, April 9). Kadin dan FEDC Rusia teken MoU dorong perdagangan dan investasi bilateral. <https://kadinindonesia.id/kadin-dan-fedc-rusia-teken-mou-dorong-perdagangan-dan-investasi-bilateral/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024, Februari 13). Pemerintah kejar tingkatkan bauran EBT.

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-kejar-tingkatkan-bauran-ebt>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024, April 10). Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Rusia, Menko Airlangga dorong optimisme Indonesia dan Rusia untuk tingkatkan hubungan bisnis dan perdagangan.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6302/hadiri-forum-bisnis-indonesia-rusia-menko-airlangga-dorong-optimisme-indonesia-dan-rusia-untuk-tingkatkan-hubungan-bisnis-dan-perdagangan>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024, April 8). Pertemuan bilateral Indonesia–Rusia, komitmen untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6307/pertemuan-bilateral-indonesia-rusia-komitmen-untuk-memperkuat-kerja-sama-ekonomi-dan-investasi-strategis>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025, Januari 8). Transkrip pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri RI tahun 2025.

<https://kemlu.go.id/publikasi/pidato/pidato-menteri/transkrip-pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2025?type=publication>

Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). Power and interdependence (4th ed.). Longman.

Kompas. (2024, Mei 2). Indonesia perluas pasar dan investasi ke Rusia. <https://www.kompas.id/artikel/indonesia-perluas-pasar-dan-investasi-ke-rusia>

Loy, N., Rachmawati, I., Issundari, S., & Seosilo, J. (2024). Barriers to Indonesia's energy transition. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 9(2), 54–65. <https://doi.org/10.14710/ijpd.9.2.1-13>

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2024, Mei 7). Bertemu pimpinan parlemen Rusia, Eddy Soeparno bahas potensi kerja sama perdagangan dan pengembangan energi terbaru. <https://mpr.go.id/berita/Bertemu-Pimpinan-Parlemen-Rusia,-Eddy-Soeparno-Bahas-Potensi-Kerjasama-Perdagangan-dan-Pengembangan-Energi-Terbarukan>
- Maulana, M., Tonggo, C., & Darodjat, R. (2024). Legal personality of BRICS and implication toward Indonesia's foreign trade policy after joining as new member. *Transnational Business Law Journal*, 5(2), 156–172. <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v5i2.2152>
- Martinus, M. (2025). Indonesia's probable foreign policy shift from the West under a Prabowo administration. *ISEAS Perspective*, (12).
- Nisa, D. R., & Sihidi, I. T. (2022). Infrastructure Development and Conflict: A Conflict Resolution in The Construction of An Oil Refinery. *JURNAL ILMU SOSIAL*, 21(1), 57-74. <https://doi.org/10.14710/jis.21.1.2022.57-74>
- Păun, D., & Păun, C. A. (2024). The role of chambers of commerce and industry in shaping Romania's trade policy: The interwar model. *CLUJ University Journal. Interdisciplinary: Social Sciences and Humanities*, 4, 37–48. <https://doi.org/10.61846/CUJI-SSH.2024.4.05>
- Pindi Gayatri, Y., Olivia, Y., & Nizmi, Y. E. (2024). Strategi Rusia dalam menghadapi sanksi ekonomi dari negara-negara Barat. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 126–140. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10119>
- Pujayanti, A. (2018). Isu Generalized System of Preferences dalam hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat. *Info Singkat DPR RI (X)*14, II, 1–12.
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. *International Organization*,

42(3), 427–460.
<https://doi.org/10.1017/S0020818300027697>

- Reuters. (2024, April 22). Russia cuts 2025 energy export income estimate by 15%, document shows. Reuters. <https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/russia-cuts-2025-energy-export-income-estimate-by-15-document-shows-2025-04-22/>
- Salsa Nabilla, G., Rahmi, G., Prawira, P. D., & Wikansari, R. (2023). Dampak perang Rusia-Ukraina terhadap ketersediaan BBM (minyak bumi) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 1–15. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.286>
- Tais, M. S. A., Dyota, D., Waqiey, E. S., Yulianti, D., & Sari, D. S. (2024). Potensi minyak bumi Indonesia di Laut Timor dalam rangka pencarian sumber energi alternatif. *Indonesian Perspective*, 9(1), 70–87. <https://doi.org/10.14710/ip.v9i1.63707>
- Tempo. (2024, Mei 3). Indonesia ingin impor minyak Rusia setelah jadi anggota BRICS, tapi khawatir sanksi AS ke Moskow. <https://www.tempo.co/ekonomi/indonesia-ingin-impor-minyak-rusia-setelah-jadi-anggota-brics-tapi-khawatir-sanksi-as-ke-moskow-1195455>
- Tirto.id. (2024, Mei 1). Pertamina pastikan impor minyak dari Rusia sudah sesuai aturan. <https://tirto.id/pertamina-pastikan-impor-minyak-dari-rusia-sudah-sesuai-aturan-hb3e>